

DWP Kabupaten Bogor Perkuat Sinergi dengan DWP Kecamatan

CIBINONG (IM) - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bogor menggelar Rapat Koordinasi Tahun 2023, di Aula DWP Kabupaten Bogor, Rabu (21/6). Hal itu dilakukan untuk memperkuat sinergi antara DWP Perangkat Daerah Kabupaten Bogor dengan seluruh DWP Kecamatan, dalam mendorong kemajuan dan pembangunan Kabupaten Bogor.

Ketua DWP Kabupaten Bogor, Nurhayati mengatakan, program yang telah ditetapkan di semua bidang dan Pokja DWP harus dilakukan secara sinergi agar bisa diimplementasikan dengan optimal secara bersama-sama untuk mendorong terwujudnya pembangunan Kabupaten Bogor lebih baik lagi.

"Karena anggota DWP adalah istri ASN, kami tidak hanya fokus pada meningkatkan penguatan organisasi DWP, juga bagaimana meningkatkan kinerja masing-masing anggota DWP.

Juga mendorong peningkatan kinerja para ASN baik Kepala Dinas, Camat juga instansinya. Sehingga kita bisa memberikan kontribusi dalam mendorong terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bogor," jelas Ketua DWP.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengungkapkan, rapat koordinasi ini menjadi ajang silaturahmi antar sesama anggota DWP dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan. Sehingga dapat memperkuat baik sesama anggota DWP juga menguatkan implementasi program-program yang telah ditetapkan bersama.

Rakor sebaiknya rutin dilakukan minimal dua bulan sekali. Jadikan pertemuan hari ini sebagai momentum saling mengenal kembali antara istri kepala dinas dengan istri para camat sehingga bisa memperkuat bersinergi yang sudah terjalin dengan baik," terang Sekda Burhanudin. ●**gio**

ENTASKAN PERSOALAN BANJIR DI CIMAH DAN SEKITARNYA

Ridwan Kamil Bentuk Badan Pengelola Cekungan Bandung

CIMAH (IM) - Kejadian banjir di Cimahi menjadi salah satu persoalan klasik yang tak kunjung usai di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Bencana tersebut kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Cimahi. Selain sampah, banjir di Cimahi tersebut dipicu dangkalnya saluran irigasi dan sempitnya drainase.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengatakan pihaknya bersama pemerintahan daerah di kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat) terus berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menangani masalah banjir tersebut.

"Salah satu upaya yang kami lakukan dengan melakukan pembentukan Badan Pengelola Cekungan Bandung," katanya di Gedung DPRD Kota Cimahi. Emil menilai, pem-

bentukan Badan Pengelola Cekungan Bandung ini dilakukan lantaran pengentasan masalah banjir di wilayah Bandung Raya memerlukan kerjasama antar daerah untuk menyelesaikan problematika tersebut.

"Saat ini sudah ada Badan Pengelola Cekungan Bandung, sehingga masalah seperti urusan air urusan transportasi dan urusan tata ruang bisa disinergikan dengan Kabupaten Bandung dan Kota Bandung jauh lebih baik" ujarnya.

Kang Emil menyebut, tugas utama Badan Pengelola Cekungan Bandung tersebut mencakup manajemen perairan tata ruang hingga integrasi transportasi.

"Adanya Badan Pengelola Cekungan Bandung Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis pengentasan masalah banjir dan masalah lainnya khususnya di area megapolitan Bandung Raya dapat segera dituntaskan" pungkasnya. ●**pra**

Semesta Berpesta di Pakansari, Gigi Hingga Fourtwny Bakal Hibur Warga Bogor

CIBINONG (IM) - Akhir pekan ini, warga Kabupaten maupun Kota Bogor siap-siap untuk berpesta dalam tajuk Semesta Berpesta.

Semesta Berpesta yang dipromotori Royal Anugerah Multimedia bakal menghadirkan sederet musisi seperti Gigi, Last Child, Maliq & d'essentials, Fourtwny, Rizky Febian dan lainnya siap menghibur di Lapangan Panahan, Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor.

Selain musisi ternama, dalam Semesta Berpesta tersebut, Royal Anugerah Multimedia selaku promotor pun mengadakan bazar kuliner dan fashion pada tanggal 24 dan 25 Juni.

Di hari pertama, pengunjung akan dihibur penampilan Rizky Febian, Fourtwny, Raisa Anggiani, Last Child, dan Vageto.

Hari kedua atau puncaknya acara Semesta Berpesta, Royal Anugerah Multimedia menampilkan Gigi, Maliq & d'essentials, Idgitaf, Axel Ramanda, dan Fade 2 Black.

Semesta Berpesta semakin meriah dengan sejumlah aktivitas seperti game show seru yang dapat dinikmati oleh pengunjung sekaligus berkesempatan untuk memenangkan hadiah-hadiah istimewa.

"Kali ini merupakan keempat kalinya Semesta Berpesta digelar. Kami sudah bertemu dengan ribuan penonton dari kota-kota sebelumnya. Antusiasme warga Bogor sejauh ini sangat luar biasa dan sampai bertemu pada 24 - 25 Juni 2023!" jelas CEO RAM

Entertainment Tomi Defantri kepada wartawan, Kamis (22/6).

Tomi Defantri menuturkan bahwa konsep kreatif dan kebahagian disuguhkan untuk menghidupkan Jiwa Semesta Berpesta dalam kebersamaan.

"Menjadi suatu kebanggaan bagi Royal Anugerah Multimedia (RAM) bisa menghadirkan konser musik yang juga memadukan fashion dan kuliner dalam satu acara," tutur Tomi Defantri.

Selain di Kabupaten Bogor, terangnya, Semesta Berpesta juga hadir di kota-kota lainnya seperti Jogja, Surabaya, Solo, Banjarmasin, Medan, Balikpapan, Palembang dan Jakarta, pada tanggal yang akan segera diumumkan. Semua penggemar musik, pecinta fashion, dan penggemar kuliner di seluruh Indonesia wajib bergabung dalam perayaan yang tak terlupakan ini.

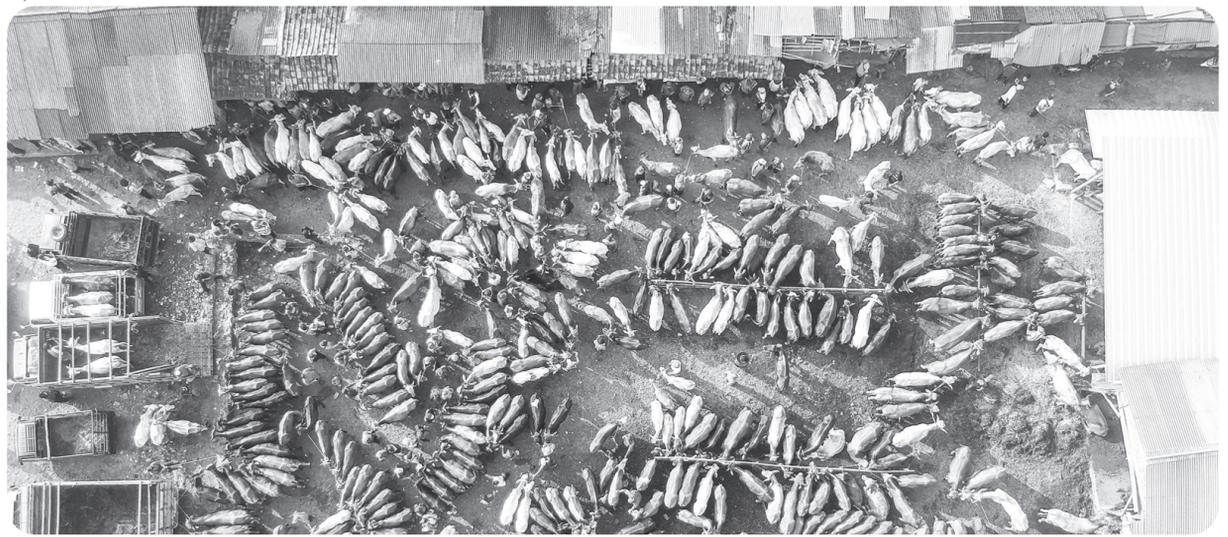
Ia pun berharap, setiap kota atau kabupaten yang akan diselenggarakan berjalan dengan aman dan kondusif. "RAM berharap antusias disetiap kota yang kita kunjungi selalu penuh kesan," harapnya.

Tomi menjelaskan tiket Semesta Berpesta kini dapat dibeli di empat platform ticketing terpercaya yaitu Goers, Tiket.com, tiket-apasaja.com dan Loket.com.

"Harga presale dimulai dari IDR 100.000,- untuk 1-day GA Pass dan IDR 200.000 untuk 2-day GA Pass. Harga tiket reguler akan dibanderol dengan harga IDR 150.000,- untuk 1-day Pass dan IDR 250.000,- untuk 2 - day Pass," jelas Tomi. ●**gio**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



PASAR HEWAN JONGGOL JELANG IDUL ADHA

Foto udara Pasar Hewan Jonggol jelang Idul Adha di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/6). Menurut pengelola, sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha pasar hewan di Jonggol kian ramai pedagang dan pembeli dengan sekitar 900 ekor sapi dan 700 ekor kambing dan domba dari berbagai jenis dijual di pasar hewan tersebut.

Rekanan SKPD Diminta Segera Kembalikan Kerugian Negara

Rekanan kerja yang belum mengembalikan dugaan kerugian negara atas temuan LHP BPK-RI tersebut yakni, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Pemcam Citeureup.

CIBINONG (IM) - Rekanan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor diharuskan segera mengembalikan kerugian negara hingga akhir Juli 2023.

Hingga kini rekanan kerja yang sudah mengembalikan kerugian negara, yakni rek-

nan kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Pemcam Caringin yang sudah menyelesaikan catatan atau temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI).

Adapun rekanan kerja

yang belum mengembalikan dugaan kerugian negara atas temuan LHP BPK-RI tersebut yakni, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Pemcam Citeureup. Rekanan kerja SKPD yang belum mengembalikan kerugian negara atau paling lama pada 28 Juli mendatang.

"Sesuai rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, rekanan kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

yang menjadi objek temuan atau catatan harus segera mengembalikan dugaan kerugian negara akibat kelebihan bayar atau paling lambat 60 hari kerja sejak LHP diserahkan ke Pemkab Bogor atau 28 Juli mendatang," kata Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kabupaten Bogor, Muhammad Hanafi kepada wartawan, Kamis (22/6).

Muhammad Hanafi menuturkan, rekanan kerja SKPD maupun OPD sebagian telah memiliki itikad baik, di mana sudah mulai mengembalikan uang dugaan kerugian negara.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan selain dugaan kerugian negara dari rekanan kerja Pemkab Bogor, BPK-RI Perwakilan Jawa Barat juga menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Prayoga

Pertambangan Energi (PPE) dan beberapa aset daerah.

"PT. PPE dan Badan Pemeriksa Keuangan Aser Daerah (BPKAD) juga menjadi temuan, kami harap persoalan hukum dan pengelolaan aset daerah bisa segera dilaksanakan rekomendasi, agar kedepan Kabupaten Bogor bisa lebih baik," jelas Muhammad Hanafi.

Ia melanjutkan, apabila catatan atau temuan BPK-RI Perwakilan Jawa Barat tidak segera dilaksanakan rekomendasinya, seperti yang tertuang dalam LHP, maka bisa saja temuan tersebut ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

"Jangan sampai tidak dibenahi temuan yang tertuang dalam LHP, karena bisa ditindaklanjuti oleh APH," lanjutnya. ●**gio**

KPU Kab. Bogor Tetapkan 3,9 Juta Sebagai DPT pada Pemilu 2024



KPU Kabupaten Bogor menetapkan 3,9 juta sebagai DPT pada Pemilu 2024.

CIBINONG (IM) - Sebanyak 3,9 juta penduduk Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Bogor, melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat KPU Kabupaten Bogor bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bogor, di IPC Residence & Convention Syariah Gadog Ciawi, Rabu (21/6).

Selain menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.889.441, KPU Kabupaten Bogor menetapkan beberapa poin seperti Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 15.228, pemilih tidak memenuhi syarat sebanyak 10.136, perbaikan daftar pemilih berjumlah 93.136 serta pemilih Non K'IP-EL sebanyak 45.579.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menerangkan, bahwa rangkaian penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dimulai sejak tahun 2020 lalu. Lalu tahun 2021 KPU juga rutin melakukan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan bersama stakeholder setiap

bulannya, dilanjutkan per triwulan sekali dilakukan proses penetapan daftar pemilih berkelanjutan. Dan pada 2022 pihaknya rutin setiap bulannya melakukan daftar pemilih berkelanjutan.

Lanjut Ummi, pada Oktober 2022 lalu, KPU RI menerima DP4 dari Kemendagri untuk selanjutnya disinkronkan antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), kemudian diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi.

Kemudian pada Januari seluruh Kabupaten/Kota mulai melakukan pemutakhiran termasuk di Kabupaten Bogor. Pada 12 Februari 2023 pihaknya mulai merekrut kurang lebih 14.952 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlil), bahkan Pantarlil Kabupaten Bogor menjadi Pantarlil terbesar se-Indonesia untuk tingkat Kabupaten dan Kota.

"Lalu pada 13 Februari hingga Maret 2023 rekanan Pantarlil kita mulai melaksanakan tugasnya, untuk kemudian output data dari rekan Pantarlil kami jadikan sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) hingga hari ini kita bisa melaku-

kan rapat pleno penetapan DPT bersama-sama," jelas Ummi.

Ummi menyatakan, setelah penetapan DPT selanjutnya KPU Kabupaten Bogor harus memasuki tahapan persiapan logistik.

"Persiapan logistik ini jadi pekerjaan penting dan berat bagi kita, dengan jumlah sekitar 3,9 juta pemilih kita harus mempersiapkan kurang lebih 17 juta surat suara, sehingga pemutakhiran harus kita terapkan dalam jumlah penetapan DPT," terang Ketua KPU Kabupaten Bogor.

Menurut Ummi, DPT juga sangat penting berkaitan dengan penentuan jumlah saksi. Minimal 15.000 orang yang akan ditempatkan dan disebar di masing-masing TPS. DPT ini sangat penting, untuk mendapatkan keakuratan data sehingga pada tahap pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan menggunakan dua mekanisme.

Salah satunya mekanisme door to door melalui rekan Pantarlil.

"Ini kita lakukan untuk menciptakan Pemilu berkualitas. Kita sama-sama sadari pemilu yang berkualitas itu berasal dari DPT yang berkualitas," imbuhnya. ●**gio**

Iwan Setiawan Tanda Tangan Kesepakatan Komponen Pendanaan Pilkada Serentak 2024

CIBINONG (IM) - Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Gubernur Jawa Barat dan bupati/wali kota se-Jawa Barat menandatangani kesepakatan bersama komponen pendanaan bersama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan bersama pada Pilkada serentak tahun 2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate, Rabu (21/6).

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, Bupati dan Wali Kota se-Jabar, Kepala Bakesbangpol Prov Jabar, Ketua KPU Prov Jabar, Ketua Bawaslu Prov. Jabar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan ini adalah acara yang sangat penting agar kita selalu kompak dalam memastikan sebuah peristiwa bersejarah tahun depan berjalan dengan baik.

"Maka kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak perlu, contohnya adalah ketidاكلانaran dalam proses kepanitiaan," tandas Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil mengungkapkan, kita sudah menghitung ada sembilan komponen yang harus dibiayai, Pemerintah Provinsi Jawa me-

ngambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya oleh pemerintah kabupaten kota.

"Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp.700-an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp 30 miliar, Rp 50 miliar, rata-rata di bawah Rp100 miliar," ungkap Ridwan Kamil

Ia juga berharap, kondusifitas yang menjadi track record Jawa Barat ini harus terjaga dengan baik. Selama yang saya tahu penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tergolong sangat prestatif, maka ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

"Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu," katanya.

Selanjutnya Ridwan Kamil menyebutkan, ini adalah peta demokrasi yang mahal, jumlah pemilu terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Karena selain ada sekitar 500 bupati, wali kota, gubernur. Ada juga partai dan presiden, sekitar 80 ribu kepala desa di Indonesia juga menggunakan mekanisme Pemilu. Maka selain mahal, ini juga pasti akan melelahkan.

"Konsekuensi mahalnya demokrasi ini harus dijawab dengan kelancaran, tingkat partisipasi yang sangat tinggi. Saya berdoa mudah-mudahan terpilih pemimpin-pemimpin berkualitas," ujar Ridwan. ●**gio**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menandatangani kesepakatan pendanaan Pilkada Serentak 2024.